

Globalisasi, Netwar, dan Isu-Isu Strategis di Asia Pasifik

Bantarto Bandoro* ✓

Nowadays, globalization gives impact to security, either national or international because of developments of science, technology, and human movement. There are five main issues in international society as consequences of globalization, which are drugs dealer, small arms trafficking, infringement of intellectual property rights, people smuggling, and money laundering. Furthermore, there is new terminology, called netwar, which is occurred because of the development of information technology and being used to break up the national and international security. Basically, a non-traditional security matter is not a new issue. It is just a local issue, which does not get public awareness but globalization has pushed it to come out and sometimes it is believed that it has become a new resource of a global threat.

Globalisasi bukanlah proses yang bersifat statis melainkan proses kelanjutan yang dinamis, mencakup integrasi pasar, negara bangsa, dan teknologi, hingga tingkat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh manusia sehingga memungkinkan individu, korporasi, dan negara bangsa saling berinteraksi secara lebih jauh, lebih cepat, dan lebih murah dibandingkan masa-masa sebelumnya.

* Penulis adalah Direktur Sarana Ilmiah dan Publikasi, dan *Chief Editor*, *The Indonesian Quarterly* CSIS. Penulis yang lahir di Jakarta pada 1954, memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master Degree dari *Graduate School of International Relations, International University of Japan, Nigata, Jepang* serta *Summer Course* mengenai *National Security*, Kiel, Jerman. Penulis selain aktif menjadi peneliti, juga aktif menjadi dosen luar biasa dan tamu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan juga instansi pemerintah lain seperti Sesko AU, AL, Sespati POLRI, dan Sisdilu Departemen Luar Negeri RI. Ia juga pengajar di Program Pasca Sarjana, Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia.

Jika globalisasi dilihat sebagai sebuah sistem yang dinamik, dimana interaksi antara para aktor semakin intensif dan kompleks, dan hubungan saling ketergantungan juga semakin kuat maka sulit dihindari kenyataan bahwa karakteristik yang seperti itu akan memberi dampak terhadap stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri.

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang sifatnya multidimensional. Teknologi informasi dan jenis-jenis teknologi lainnya berkembang secara pesat dan merebak dengan luas. Perdagangan berkembang secara global, arus investasi dan dana juga bergerak secara cepat. Saling ketergantungan berkembang hampir dalam setiap kehidupan.

Di satu pihak, perkembangan demikian menciptakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebebasan berpolitik, dan menciptakan perdamaian. Di lain pihak, perkembangan itu juga menghasilkan kekuatan yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial, memunculkan kerawanan, dan menebarkan benih-benih kekerasan dan konflik. Ancaman dalam era globalisasi ini bukan lagi bersumber dari kegiatan-kegiatan militer. Berbagai jenis ancaman kini menjadi global sifatnya. Efek globalisasi sifatnya tidak diskriminatif. Kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi.

Intensifikasi Hubungan dan Ruang Transnasional Baru

Globalisasi secara abstrak dirumuskan sebagai “keseluruhan proses dimana masyarakat di dunia bergabung dalam sebuah masyarakat dunia tunggal, yaitu *global society*”¹ dan sebagai “intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian-bagian dunia lainnya atau sebaliknya”.² Sementara itu, Aart

¹ Martin Allbrow dan Elizabeth King (eds), *Globalization, Knowledge, and Society*, (London: Sage Publication, 1990).

Scholte,³ peneliti globalisasi, mengatakan bahwa konsep globalisasi menggambarkan lima macam fenomena, yaitu globalisasi sebagai sebuah internasionalisasi; globalisasi sebagai sebuah liberalisasi; globalisasi sebagai universalisasi; globalisasi sebagai westernisasi; dan deteritorialisasi.

Robert Keohane dan Joseph Nye⁴ menggambarkan globalisasi (mereka menyebutnya dengan istilah *globalisme*) sebagai "situasi dunia yang melibatkan jaringan-jaringan interdependensi pada jarak yang multikontinental". Keohane dan Nye menggambarkan saling ketergantungan itu dalam lima bidang, yaitu ekonomi, budaya, masyarakat, lingkungan, dan militer.

Ide dasar penggerak globalisasi adalah kapitalisme pasar bebas - *free market capitalism*, dimana semakin kita menjadikan pasar sebagai aturan main dan membuka ekonomi terhadap perdagangan bebas dan kompetisi maka ekonomi akan menjadi semakin efisien dan berkembang.

Dalam globalisasi, pemaknaan teknologi tidak lagi disajikan dalam bentuk penguasaan nuklir melainkan pada komputerisasi, digitisasi, satelit komunikasi, teknologi serat optik, dan internet. Teknologi ini memiliki kontribusi penting pada terciptanya perspektif baru tentang dunia. Jika pada masa Perang Dingin perspektif dominannya adalah *division* maka pada era globalisasi perspektif dominannya adalah *integration*. Selanjutnya, *wall* (dinding) yang dipandang sebagai simbol dari sistem Perang Dingin, telah digantikan oleh *World Wide Web* yang kini telah menyatukan setiap orang di dunia.

² Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Stanford: Standford University Press, 1990).

³ Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction*, (London: Macmilan, 2000).

⁴ Robert Keohane dan Joseph S. Nye, "Globalization: What's New? What's Not (And So What?)," *Foreign Policy*, 118, 2000.

Sistem globalisasi dibangun oleh tiga keseimbangan yang tidak jarang saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lainnya, yaitu:

1. Keseimbangan pertama adalah keseimbangan antara Amerika Serikat sebagai adidaya tunggal dan entitas lain di luar Amerika Serikat.
2. Keseimbangan kedua adalah antara negara bangsa dan pasar global yang terbentuk oleh jutaan investor yang dapat menggerakkan kekayaan mereka setiap saat, tanpa dibatasi oleh aturan hukum dan batas teritorial. Para pelaku pasar ini umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat keuangan dunia (*supermarkets*) dan perilaku mereka dapat mempengaruhi kehidupan suatu negara bangsa. Ini bisa memicu jatuhnya suatu pemerintahan.
3. Keseimbangan ketiga adalah antara individu dan aktor negara bangsa. Karena globalisasi telah menghancurkan banyak tembok yang membatasi gerak manusia dan menyatukan dunia melalui jaringan-jaringan (*networks*) maka globalisasi pun memberikan kekuatan tambahan kepada individu untuk mempengaruhi pasar maupun negara bangsa.

Bisa dikatakan bahwa aspek kunci dari globalisasi adalah pembentukan ruang transnasional baru dan tidak terbatas untuk berinteraksi, sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh negara. *Netwar*, seperti yang dibahas di bawah, terjadi dalam kondisi demikian.

Globalisasi bukan saja mengintegrasikan unit-unit politik yang beragam ke dalam kerangka ekonomi global tetapi juga melemahkan batasan antara wilayah (*spheres*) publik dan privat. Sebagai akibatnya, globalisasi ekonomi akan menghapuskan kedaulatan internal sebuah negara dengan mereduksi kemampuannya untuk mengatur secara efektif. Selain itu, globalisasi juga akan menginternasionalisasikan kedaulatan internal dan membuka kelemahan dan kekurangan dari negara yang bersangkutan.

Globalisasi dan Isu Keamanan

Globalisasi, apapun definisinya, memberi dampak terhadap keamanan nasional maupun internasional. Yang paling berbahaya adalah bahwa berbagai jenis ancaman kini menjadi global sifatnya dan memberi dampak serius. Ini semua karena merebaknya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan tingginya arus pergerakan manusia.

Berbagai aspek dari globalisasi, potensial untuk meningkatkan bahaya dari berbagai ancaman transnasional seperti proliferasi senjata konvensional, serangan maya, kekerasan etnik, lalu lintas narkoba, degradasi lingkungan, merebaknya penyakit menular, dan lain sebagainya.

Keuntungan-keuntungan ekonomi akan diperoleh melalui ekspansi perdagangan, investasi asing secara langsung, dan pergerakan dana lintas batas secara mudah dan cepat. Akan tetapi, setiap aspek dari globalisasi ini akan menghasilkan efek ekonomi yang problematik, antara lain pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan kelumpuhan finansial. Jika pemerintah suatu negara tidak mampu mengatasi masalah ini, kesulitan-kesulitan ekonomi ini akan menyumbang kepada berbagai macam kegiatan kejahatan internasional, pemotongan anggaran untuk kesehatan, dan arus pengungsi dan migrasi dalam skala yang besar. Ini pada gilirannya menjadi wadah bagi munculnya ancaman transnasional.

Ada lima macam perang atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional sebagai akibat proses globalisasi, yaitu lalu lintas narkoba, lalu lintas senjata ringan dan kaliber kecil, pelanggaran hak milik intelektual, penyelundupan manusia, dan pencucian uang. Perang-perang itu memiliki karakteristik yang sama, yaitu perang-perang itu tidak terikat pada faktor geografis, perang itu merongrong dan menentang konsep kedaulatan, perang itu merusak kekuatan pasar, dan perang itu juga akan memaksa birokrasi berhadapan dengan jaringan kriminal. Masalah-masalah itu dapat diatasi secara efektif hanya melalui kerja sama internasional.

Perubahan-perubahan politik seringkali mengarah pada deregulasi dalam pasar modal yang sekarang ini memfasilitasi transfer uang secara lintas batas, sementara kemajuan teknologi telah membuat jarak dan batasan menjadi kabur sehingga membuat uang dan pergerakannya secara fisik tidak bisa dilihat.

Perubahan-perubahan fundamental yang meningkatkan intensitas bagi kelima perang tersebut, selama satu dasawarsa terakhir akan tetap ada. Teknologi akan tetap merebak secara luas tanpa batas, sementara jaringan-jaringan kriminal akan mampu mengeksploitasi teknologi itu lebih cepat daripada pemerintah yang kerap menghadapi anggaran ketat, birokrasi, dan sebagainya. Perdagangan internasional juga akan semakin berkembang dan hal ini akan menutupi kegiatan dan ekspansi perdagangan yang dilakukan secara gelap. Migrasi internasional juga akan berkembang, dengan efek yang sama, dan memfasilitasi pembentukan geng-geng dengan latar belakang etnis. Merebaknya demokrasi juga akan membantu kartel-kartel penjahat dan dapat memanipulasi institusi publik yang lemah dengan cara menyuap petugas polisi atau menawarkan kepada politisi uang tunai untuk biaya kampanye.

Semuanya itu merupakan isu keamanan (nasional) yang tidak dapat dihindari oleh negara ketika negara itu berhadapan dengan sebuah proses yang mengikis kedaulatan. Kedaulatan negara tidak hilang tetapi telah berkurang fungsinya untuk mendeteksi bahkan menangkal pengaruh yang dibawa oleh proses globalisasi.

Globalisasi dan *Netwar* sebagai Aspek Permamen

Globalisasi telah menghancurkan banyak tembok yang membatasi ruang gerak manusia dan menyatukan dunia melalui jaringan-jaringan (*networks*). Oleh sebab itu, globalisasi memberikan kekuatan tambahan kepada individu dan kelompok serta aktor non-negara lainnya untuk mempengaruhi pasar maupun negara.

Dalam era globalisasi ini, upaya mengatasi efek dari globalisasi di masa depan selalu menjadi berita besar. Perang di masa depan tidak lagi melibatkan militer dari sebuah negara kuat atau melibatkan senjata pemusnah massal atau mesin-mesin perang lainnya seperti tank atau pesawat-pesawat tempur tetapi melibatkan kombatan-kombatan yang memanfaatkan jaringan yang terbuka akibat globalisasi, misalnya teroris, kartel obat bius, organisasi kejahatan, atau jaringan aktifis masyarakat sipil yang berjuang untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

Jaringan yang sudah kuat dan mapan terbukti sulit untuk diatasi karena mereka beroperasi secara terpecah dan sulit dideteksi. Semua fitur organisasi, doktrin, strategi, dan teknologi berbentuk dan berbasis jaringan, disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan dalam abad informasi ini. Taktik yang mereka gunakan adalah mulai dari perang ide sampai aksi sabotase dan bahkan banyak taktik yang memanfaatkan jaringan internet.

Informasi revolusi memunculkan organisasi berbentuk jaringan (*network forms of organization*). Meningkatnya jaringan berarti kekuatan akan berpindah dari aktor negara ke aktor-aktor non-negara karena aktor-aktor non-negara ini mampu mengorganisir diri mereka melalui jaringan-jaringan multidimensi. Ini berarti bahwa konflik-konflik akan semakin digerakkan oleh jaringan dan siapa pun yang menguasai jaringan akan berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan politis, ekonomi maupun keamanan.

Merebaknya organisasi berbentuk jaringan dan teknologi ini membawa resiko dan bahaya baru karena dapat digunakan untuk memunculkan ancaman terhadap kebebasan dan *privacy*. Bukan hanya itu, sistem informasi dan infrastruktur nasional dalam bidang telekomunikasi dan transportasi akan semakin rawan terhadap aksi teroris maya dan *hacker* komputer. Kesenjangan digital antara mereka yang memiliki informasi dan tidak memiliki informasi juga akan semakin lebar dan ini pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial pada level masyarakat.

Meningkatnya jaringan berarti terbentuknya perang maya sebagai sebuah cara dan wilayah dimana sebuah konflik militer dilakukan. Kini kita bisa membangun sebuah konsep yang paralel mengenai konflik abad informasi ini tetapi tidak melibatkan kekuatan militer namun melibatkan skala yang rendah dan lebih menyentuh spektrum yang lebih sosial. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kecenderungan demikian adalah *netwar* karena adanya revolusi informasi yang berpihak kepada organisasi, doktrin, dan strategi yang berbentuk jaringan.

Istilah *netwar* merujuk kepada munculnya cara konflik (*mode of conflict*) dan kejahatan pada level masyarakat, yang tidak melibatkan unsur militer, dimana para pelakunya menggunakan organisasi, doktrin, dan strategi berbentuk atau berbasis jaringan yang disesuaikan dengan abad informasi. Para pelaku *netwar* bisa terdiri dari organisasi yang terpencar-pencar, kelompok-kelompok kecil dan individu yang melakukan komunikasi, koordinasi dan kampanye dengan memanfaatkan internet, bahkan tanpa adanya komando sentral.

Munculnya istilah *netwar* ini sebenarnya adalah untuk memberi peringatan mengenai sebuah prospek bahwa kejahatan dan konflik yang berbasis jaringan akan menjadi fenomena besar abad mendatang. Berbagai aktor kini terlihat telah bergerak ke arah fenomena tersebut. Para pelaku memodifikasi struktur dan strategi mereka dengan memanfaatkan disain-disain jaringan, misalnya kelompok teroris transnasional, proliferasi senjata pemusnah massal secara gelap, sindikat narkoba, gerakan ethnonasionalis, pembajakan hak cipta dan penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Dalam spektrum *netwar* ini, juga termasuk generasi baru revolusionis sosial, kelompok radikal, dan aktifis yang secara meyakinkan mampu membangun ideologi abad informasi, dimana identitas dan loyalitas bergeser dari level negara ke masyarakat sipil global yang transnasional. Kebanyakan, meskipun tidak semuanya, aktor *netwar* adalah non-negara dan bahkan tidak memiliki kewarganegaraan. Beberapa diantaranya bisa merupakan agen negara atau bahkan ada yang menggunakan negara sebagai agen mereka. Selain itu, aktor *netwar* juga bisa bersifat sub-nasional

transnasional. Mereka-mereka inilah yang memainkan peran dalam kelima peran seperti disebutkan di atas.

Dewasa ini, meningkatnya *netwar* merupakan sebuah fenomena bahwa dunia kini sedang mengalami guncangan (*disruptance*), transisi dari era modern (masa Perang Dingin) ke era yang hingga kini sulit diberi nama yang pasti. *Netwar*, ketergantungannya pada jaringan, difasilitasi oleh kemajuan secara radikal dalam konektivitas transnasional dan *Netwar* juga distimulir oleh semakin besar dan terbukanya akses untuk meningkatkan konektivitas dalam arti yang lain, yaitu hubungan "outsider" dan "insider" untuk mendapatkan akses ke masing-masing pihak dan bahkan konektivitas itu juga dapat membuat pihak "insider" menjadi sangat tertutup dan sulit dideteksi oleh pihak lainnya. Ini berarti bahwa *netwar* bukanlah fenomena transnasional tetapi akan menjadi aspek permanen dalam era baru ini.

Dampak globalisasi tidak hanya dirasakan pada level global tetapi juga nasional. Para pembuat keputusan nasional dihadapkan pada situasi dimana mereka dipaksa untuk menentukan pilihan kebijakan mereka.

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA

Asia dan Asia Pasifik

Seperti dikatakan di atas, efek globalisasi tidak diskriminatif. Kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi. Selain masih menyisakan sisa-sisa Perang Dingin, kawasan Asia Pasifik ini juga menyaksikan munculnya isu-isu baru yang berpotensi memberi dampak terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Isu-isu tersebut termasuk dalam kategori non-tradisional. Masalah keamanan non-tradisional akhirnya menjadi isu yang menjadi agenda penting pertemuan-pertemuan internasional.

Masalah keamanan non-tradisional bukanlah masalah baru. Masalah itu hanya merupakan isu lokal yang tidak

mendapat perhatian publik namun era globalisasi mendorong masalah-masalah tersebut muncul ke permukaan dan bahkan masalah itu diyakini telah menjadi sumber ancaman global baru.

Ada beberapa alasan historis yang menjadi dasar munculnya isu-isu tersebut. *Pertama*, tatanan politik internasional yang dianggap tidak adil, yaitu sebuah tatanan yang menyaksikan eksploitasi negara-negara berkembang oleh negara-negara maju. Ini kemudian menjadi dasar bagi munculnya resistensi, kalau bukan konflik, dari kelompok negara-negara yang menjadi target eksploitasi. Terorisme diasumsikan muncul karena faktor demikian. Tiadanya harmoni dalam tatanan internasional, semakin diperparah oleh kecenderungan hegemoni negara-negara besar. Akibatnya, komunitas negara-negara berkembang yang lemah harus bergulat untuk memperjuangkan aspirasi mereka bahkan dengan aksi-aksi kekerasan.

Kedua, ekonomi dunia yang tidak seimbang juga memunculkan isu ketidakamanan (*insecurity*). Meskipun negara-negara memperoleh kesempatan untuk membangun kerja sama internasional guna memajukan pembangunan ekonomi mereka, gelombang globalisasi justru memperbesar kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin. Akses negara-negara berkembang ke sumber-sumber ekonomi menjadi semakin terbatas dan ini bukan hanya karena mereka tidak mampu bersaing tetapi juga karena keterbelakangan mereka dalam mengejar dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semuanya ini memberi kontribusi kepada munculnya masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi demikian dapat menjadi sumber lahirnya kegiatan-kegiatan terorisme atau bentuk-bentuk kejahatan transnasional lain, misalnya penyelundupan manusia dan lalu lintas narkoba.

Ketiga, situasi yang tidak seimbang antara pembangunan manusia dan lingkungan alam telah memunculkan isu-isu keamanan lingkungan. Pola pembangunan yang tradisional menyebabkan munculnya ketidakharmonisan antara manusia dan lingkungan dan ini menghadapkan manusia kepada isu keamanan lingkungan, misalnya bencana alam atau kelangkaan sumber-sumber air.

Keempat, kegagalan dalam pembentukan mekanisme kontra krisis internasional telah mempersulit identifikasi dan penanganan ancaman keamanan non-tradisional. Seperti dikatakan di atas, globalisasi ekonomi yang semakin nyata telah memunculkan saling ketergantungan yang semakin kuat antar negara. Akan tetapi, kondisi demikian ini bisa membuat pembangunan ekonomi mengalami pasang surut terutama jika ekonomi dari negara bersangkutan tidak mampu menjaga dan mengelola saling ketergantungan tersebut. Ini pada gilirannya, dapat memberi kontribusi kepada munculnya krisis finansial. Dengan kata lain, tiadanya mekanisme internasional untuk mengatasi krisis finansial menyebabkan munculnya isu keamanan finansial.

Tantangan Keamanan Non Tradisional di Asia Pasifik

Dalam satu dasawarsa terakhir saja, Asia menghadapi serangkaian tantangan keamanan tradisional, antara lain krisis finansial 1997-1998, masalah asap di Asia Tenggara, masalah penyakit SARS⁵ dan flu burung, terorisme internasional, kegiatan kejahatan transnasional, dan bencana tsunami 2004.

Isu keamanan non-tradisional memiliki implikasi langsung terhadap keamanan Asia Pasifik secara keseluruhan dan kemakmuran dari masing-masing negara di kawasan. Gravitasi dari persoalan-persoalan itu dapat dilihat dari bagaimana isu-isu tersebut dibicarakan, yaitu baik di forum akademik maupun para pembuat kebijakan. Isu-isu demikian digambarkan dan diperlakukan oleh para pembuat keputusan sebagai isu yang mengancam kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara dan kemakmuran rakyatnya.

Pertanyaannya adalah apakah yang dianggap sama dari tantangan keamanan non-tradisional itu. Jika diamati lebih dalam, isu-isu tersebut memiliki karakter domestik dan internasional dan pada umumnya dirumuskan lebih dalam konteks sosial dan

⁵ Diskusi mengenai implikasi keamanan dari SARS lihat Mely Caballero-Anthony, "SARS in Asia: Crisis, Vulnerabilities, and Regional Responses", *Asian Survey*, 45:3, Juni 2005, hal. 475-495.

ekonomi daripada dalam konteks militer. Isu keamanan non-tradisional bukan hanya mengancam keamanan negara tetapi juga masyarakat, individu, ekonomi nasional, dan ekosistem. Lebih dari itu, merebaknya dan dampak dari ancaman isu non-tradisional terhadap keamanan semakin diperbesar oleh percepatan dari efek globalisasi. Ini berarti bahwa ada korelasi antara tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh isu non-tradisional ini dan percepatan dari proses globalisasi.

Beberapa isu keamanan non-tradisional yang cukup menyita perhatian kawasan Asia Pasifik antara lain (1) penyakit menular (SARS dan *avian flu*); (2) kejahatan transnasional, misalnya *drug trafficking*, pencucian uang, perompakan, penyelundupan senjata, kejahatan maya, pemalsuan kartu kredit; dan (3) kemiskinan.

Episode SARS tahun 2003, yang muncul sebagai salah satu penyakit yang menakutkan dalam sejarah modern, instruktif sifatnya karena penyakit itu menunjukkan bahwa pandemi tersebut lebih daripada sekedar krisis kesehatan. Impak dari SARS tidak dibatasi hanya kepada kematian penduduk tetapi juga merebak ke bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan bahkan keamanan. Virus ini telah menginfeksi sekitar delapan ribu orang di seluruh dunia dan membunuh sekitar 800 orang.

Kepanikan masyarakat akibat penyakit ini diperparah oleh kenyataan tidak adanya obat penyembuh. Jumlah kematian akibat SARS lebih rendah daripada jumlah kematian akibat olah raga tinju atau bencana tsunami dan kebanyakan, korban SARS adalah orang-orang yang relatif sehat. Terlihat bahwa dampak psikologisnya sangat signifikan. Dalam kata-kata Dr. Cecillia dari *Centre for Behavioral Health*, Universitas Hong Kong, "*when doctors and nurses cannot take care of themselves (become victims), the whole community panics*". Dipastikan bahwa penyakit ini menempatkan kapabilitas medis kawasan Asia Pasifik dalam taruhan.

Dampak SARS juga dilihat dalam perspektif ekonomi. Dampak ekonomi dari SARS terlihat dari terganggunya kegiatan ekonomi di beberapa negara Asia. Meskipun masa panik tidak lebih dari lima bulan sejak ada peringatan mengenai SARS, kerugian

ekonomi diperkirakan sekitar 50 milyar dollar AS untuk kawasan Asia sendiri dan sekitar 150 milyar dollar AS untuk seluruh dunia.

Masalah kejahatan transnasional juga menyita perhatian negara-negara di Asia Pasifik. Beberapa organisasi kejahatan transnasional yang sangat berbahaya beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Kejahatan semacam ini jelas merupakan ancaman terhadap perbatasan nasional, mengerosi aturan-aturan hukum, ekonomi nasional, dan masyarakat madani. Masalah kejahatan transnasional memerlukan tanggapan secara transnasional juga tetapi kerja sama antar negara seringkali diperumit oleh kenyataan bahwa penanganan masalah itu menyentuh isu sensitif seperti yurisdiksi domestik, hukum ekstradisi, dan korupsi.

Lalu lintas narkoba mungkin merupakan isu kejahatan transnasional serius yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Pasifik, khususnya Asia Timur. Dampak ekonomi dari isu lalu lintas narkoba sangat dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik. Lalu lintas narkoba ini juga menyebabkan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan, merebaknya HIV/Aids, dan potensi sumber daya manusia yang terbuang.

Dua Kategori Ancaman Keamanan Tradisional di Asia Pasifik

Saat ini, ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam dua kategori. Kategori *pertama* adalah masalah keamanan non-tradisional yang secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi Asia Pasifik, yaitu:

1. Masalah keamanan ekonomi dengan krisis ekonomi sebagai inti persoalannya.
2. Masalah keamanan sumber daya alam dengan keamanan energi sebagai inti persoalan. Sebagian besar negara di Asia Pasifik akan mengalami kekurangan energi, khususnya Jepang, Cina, dan India, yang sangat tergantung pada impor energi. Pemasok energi mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sangat tidak stabil, misalnya di Timur Tengah dan Asia Tengah sehingga seluruh negara di kawasan akan menghadapi ancaman

serius pada suplai energi mereka, khususnya jika keamanan rute energi dan pipa transnasional tidak dijamin keamanannya.

3. Masalah keamanan lingkungan dengan keamanan sumber air sebagai inti persoalan. Meningkatnya populasi dan ekonomi Asia Pasifik tidak hanya memunculkan tuntutan yang lebih besar atas sumber-sumber air tetapi juga menimbulkan polusi besar dan merusak lingkungan termasuk sumber-sumber air. Pada saat ini, kelangkaan air mengancam banyak negara di kawasan, bahkan air minum untuk masyarakat tidak bisa dijamin kebersihannya.

Kategori *kedua* adalah isu keamanan yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal dimana ekonomi dan masyarakat tumbuh pesat, yaitu:

1. Terorisme. Terorisme muncul sebagai akibat ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Ia menjadi gejala yang sulit dideteksi kemunculannya ketika sebuah ekonomi menunjukkan keberhasilannya tetapi justru menimbulkan ketidakadilan bagi sekelompok masyarakat. Aksi teror akhirnya menjadi pilihan untuk mengedepankan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, ditemukan wilayah yang luas mulai dari Timur Tengah sampai ke Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang sangat kuat kegiatan terorismenya sehingga dianggap sebagai *front* terdepan bagi pergulatan memberantas terorisme. Pada saat yang sama, di beberapa negara ditemukan unsur-unsur atau kekuatan yang berbasis ekstrimis agama dan mereka yang ingin memisahkan diri. Terorisme, unsur yang berbasis agama dan kelompok yang ingin memisahkan diri ini, saling berkaitan satu dengan lainnya. Mereka tidak hanya secara langsung membahayakan integritas teritorial, stabilitas, dan pembangunan nasional tetapi juga mempengaruhi stabilitas pembangunan kawasan secara keseluruhan.
2. Kejahatan transnasional dengan lalu lintas narkoba sebagai inti persoalan. Tiga dari empat wilayah produksi narkoba ada di kawasan Asia Pasifik, yaitu segitiga emas; sabuk bulan sabit

(*crescent*) di Afghanistan, Iran, dan Pakistan; dan Lembah Bekaa di Libanon. Banyak dari kejahatan narkoba ini kini membentuk kelompok atau jaringan dan bahkan dipersenjatai.

3. Penyebaran penyakit dengan AIDS sebagai ancaman utamanya. Meskipun tingkat penularan di kawasan Asia Pasifik tidak separah di Afrika tetapi ada kecenderungan dari penyakit itu untuk lebih meluas. Orang yang terjangkit penyakit ini di wilayah-wilayah padat penduduk di Cina, India, dan Indonesia, jumlahnya bertambah dari waktu ke waktu. Merebaknya SARS juga menjadi perhatian negara-negara Asia Pasifik. Penyebaran yang sangat luas dari penyakit semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang besar tetapi juga memunculkan masalah-masalah sosial.

Ada yang berpendapat bahwa ancaman keamanan non-tradisional sebenarnya tidak beroperasi secara sendirian namun juga berhubungan dan berinteraksi dengan ancaman keamanan tradisional. Kedua macam isu ini bahkan bisa saling berubah dalam situasi tertentu, dalam arti ancaman keamanan non-tradisional dapat berubah menjadi ancaman keamanan tradisional, atau sebaliknya, sehingga mengaburkan batasan-batasan yang memisahkan antara kedua ancaman tersebut.

Pertama, ancaman keamanan non-tradisional secara langsung dapat memunculkan isu keamanan tradisional, misalnya masalah pengungsi, kerusakan dan polusi lingkungan, merupakan dampak langsung dari perang. Kedua, beberapa isu keamanan tradisional dapat berkembang menjadi isu keamanan non-tradisional, misalnya lahirnya terorisme sangat berhubungan erat dengan sebuah mentalitas yang menolak hegemoni, dengan konflik dan gangguan-gangguan yang dipicu oleh isu kedaulatan dan teritorial. Ketiga, beberapa isu keamanan non-tradisional dapat memunculkan konflik dan sengketa-sengketa yang termasuk dalam kategori keamanan tradisional, misalnya upaya teroris untuk mendapatkan peralatan teknologi canggih, seperti nuklir, senjata biologis dan kimia, akan mendorong proliferasi senjata pemusnah massal. Sifat interaktif dari kedua macam isu keamanan tersebut juga ditemukan di wilayah Asia Pasifik.

Respon dan Kerja Sama Regional

Seperti telah dikatakan di atas, ancaman keamanan transnasional harus ditanggapi secara transnasional dan melibatkan negara-negara yang bukan hanya menjadi korban dari ancaman tersebut tetapi juga negara-negara lain yang hirau terhadap efek negatif dari ancaman keamanan non-tradisional tersebut. Kawasan Asia Pasifik tidak tinggal diam atas merebaknya ancaman keamanan tradisional tersebut.

Dalam kasus penyakit menular, beberapa negara anggota ASEAN dan Cina mengambil respon cukup positif. SARS telah mendorong koordinasi yang semakin intensif antar negara-negara di kawasan. Langkah-langkah regional untuk mengatasi efek dari SARS telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antar para menteri kesehatan dari ASEAN dan tiga negara Asia Timur (mekanisme ASEAN+3). Langkah lainnya adalah kerja sama kawasan dengan badan kesehatan dunia (WHO). ASEAN secara khusus bahkan telah memikirkan untuk membangun semacam kerangka regional untuk menanggapi secara cepat menjangkitnya penyakit menular ini. Dalam kasus terorisme dan lalu lintas narkoba, ASEAN juga telah mencapai sepakat untuk memerangi ancaman keamanan tradisional ini melalui kerja sama regional.

Hanya melalui kerja sama regional, ancaman keamanan non-tradisional dapat diatasi secara efektif. Melalui kerja sama tersebut, negara-negara akan memahami lebih jauh bukan hanya konteks munculnya isu keamanan non-tradisional tetapi juga preferensi spesifik dari negara-negara dalam memerangi ancaman keamanan non-tradisional tersebut. Koordinasi antar negara di kawasan Asia Pasifik menjadi penting ketika isu keamanan non-tradisional tersebut telah menyentuh aspek kedaulatan dan integritas teritorial dari negara-negara yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

Dalam kerja sama tersebut, negara-negara Asia Pasifik perlu sepakat bahwa keamanan non-tradisional pada hakekatnya adalah transnasional. Selain itu, keamanan nasional, keamanan regional,

dan keamanan global saling terkait. Dalam mengatasi isu keamanan non-tradisional ini, khususnya ketika mereka harus mengedepankan kepentingan dan kewajiban bersama, semua negara di Asia Pasifik perlu berfikir di luar konsep keamanan tradisional. Hanya dengan merubah cara pandang mereka mengenai konsep keamanan ini, ancaman keamanan non-tradisional ini dapat diatasi secara lebih komprehensif.

Rekomendasi

Berikut di bawah ini adalah beberapa langkah yang mungkin dapat diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu:

1. Membangun *hot line* antar para penegak hukum negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
2. Membentuk mekanisme regional terstruktur untuk mengatasi kejahatan transnasional dan membentuk mekanisme pertemuan darurat untuk menangani insiden yang muncul akibat kejahatan transnasional.
3. Kerja sama keamanan negara-negara Asia Pasifik harus memanfaatkan mekanisme bilateral dan multilateral, misalnya konsultasi keamanan regional atau pertemuan diplomatik.
4. Membangun sistem pencegahan dan peringatan dini melalui koordinasi tingkat tinggi.
5. Tukar menukar dan pelatihan personel penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan aksi-aksi kontra melawan ancaman keamanan non-tradisional.
6. Bantuan teknik dan finansial negara maju kepada negara-negara berkembang sebagai refleksi langkah bersama dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, negara-negara juga perlu memperhatikan dan menghormati beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Piagam PBB. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam tidak boleh dilanggar.
2. Kedaulatan harus dihormati. Jika ada ancaman keamanan non-tradisional dan negara yang bersangkutan belum mengambil langkah-langkah efektif maka negara lain perlu memberi bantuan tetapi bukan dengan intervensi atau membantu menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara militer tradisional.
3. Menghindari sikap mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Keamanan non-tradisional akan selamanya bersifat transnasional. Setiap negara tidak bisa membiarkan dirinya terus mengambil sikap tertutup, apalagi ketika ada negara lain yang terancam oleh isu-isu non-tradisional. Sikap *selfish* hanya akan membuka peluang meluasnya ancaman keamanan non-tradisional.
4. Tidak boleh mengangap enteng langkah-langkah responsif untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional. Artinya, ancaman keamanan non-tradisional sangat kompleks dan karena itu diperlukan langkah-langkah koordinatif yang sifatnya komprehensif.